

MENGERAKKAN EKONOMI HIJAU BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI TANAH PAPUA

Jeane Talakua¹, Putri Patria Kusuma², Karsinah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Jawa Tengah

Email: talakuajeane@mail.unnes.ac.id

Article History

Received: 16-10-2025

Revision: 10-11-2025

Accepted: 12-11-2025

Published: 12-11-2025

Abstract. This paper examines the potential for implementing a green economy in Papua through an approach based on the local wisdom of indigenous peoples. Papua, with its extraordinary biodiversity and forest ecosystems, faces serious challenges due to the unsustainable exploitation of natural resources. Conventional economic development models often ignore cultural and ecological values, leading to deforestation and environmental degradation. Therefore, this paper aims to formulate an alternative model that integrates forest conservation with economic development. This research uses a qualitative approach with case studies and participatory observation in several sources of literature on Papua. The results show that local wisdom, which is rooted in a worldview that sees nature as an integral part of identity and survival, is a strong foundation for building a nature-based circular economy. The application of this concept can be realized through several strategies, including: (1) Green Economy Initiatives and Projects in Papua, including the Sustainable Agriculture and Local Wisdom Sector, Renewable Energy Development, and Building Environmentally Friendly Tourism; (2) Strengthening Social Foundations: Participation of Indigenous Peoples and Local Communities, and (3) case study analysis and best practices. In conclusion, driving the green economy in Papua is not only about creating new sources of income, but also about recognizing and respecting the rights and traditional knowledge of indigenous peoples.

Keywords: *Green Economy, Forests, Local Wisdom, Papua, Sustainability.*

Abstrak. Tulisan ini mengkaji potensi penerapan ekonomi hijau di Tanah Papua melalui pendekatan yang berlandaskan pada kearifan lokal masyarakat adat. Papua, dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutannya yang luar biasa, menghadapi tantangan berat akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Model pembangunan ekonomi konvensional sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya dan ekologis, sehingga menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan model alternatif yang mengintegrasikan konservasi hutan dengan pengembangan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dan observasi partisipatif di beberapa sumber literatur tentang Papua. Hasil menunjukkan bahwa kearifan lokal, yang berakar pada pandangan hidup yang memandang alam sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup, adalah fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi sirkular berbasis alam. Penerapan konsep ini dapat diwujudkan melalui beberapa strategi, antara lain: (1) Inisiatif dan Proyek Ekonomi Hijau Unggulan di Papua di dalamnya ada Sektor Pertanian Berkelanjutan dan Kearifan Lokal, Pengembangan Energi Terbarukan, Membangun Pariwisata Ramah Lingkungan ; (2) Penguatan Fondasi Sosial: Partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, serta (3) analisis studi kasus dan praktik terbaik. Kesimpulannya, menggerakkan ekonomi hijau di Papua tidak hanya tentang menciptakan sumber pendapatan baru, tetapi juga tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Hutan Hidup, Kearifan Lokal, Tanah Papua, Berkelanjutan.

How to Cite: Talakua, J., Kusuma, P.P., Karsinah. (2025). Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis Kearifan Lokal Di Tanah Papua. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 7200-7213. [10.54373/ifijeb.v5i4.4384](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i4.4384)

PENDAHULUAN

Tanah Papua, dengan keanekaragaman alam yang luar biasa, termasuk luasnya hutan tropis dan biodiversitas yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi contoh dalam pembangunan berkelanjutan. Daerah ini diakui sebagai "ibu kota alami dunia" karena merupakan tempat bagi hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, membuatnya menjadi aset lingkungan yang sangat berharga. Tetapi di balik potensi tersebut, Papua menghadapi permasalahan serius akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penggundulan hutan, serta dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata. Praktik-praktik tersebut mengancam kelangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kerangka ini, gagasan ekonomi hijau sangatlah penting. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi Papua untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya adil dan merata, tetapi juga berusaha untuk melindungi lingkungan serta melestarikan tradisi masyarakat lokal. Ekonomi hijau di Papua lebih dari sekadar pengembangan sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan; ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memahami dan melaksanakan pembangunan. Bagi wilayah yang memiliki hak ulayat yang kuat dan hubungan budaya yang mendalam dengan alam, ekonomi hijau perlu menggabungkan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial sebagai fondasi utama, bukan sekadar efek samping. Ini menegaskan bahwa jalan menuju pembangunan hijau bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan mendesak untuk melindungi aset-aset penting Papua dari penipisan yang disebabkan oleh model ekonomi konvensional yang bersifat ekstraktif.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi ramah lingkungan sangat penting bagi Papua, mengingat statusnya sebagai salah satu daerah dengan sumber daya alam paling melimpah di planet ini. Papua memiliki hutan hujan yang merupakan yang ketiga terbesar di dunia, menjadikannya "pusat alami dunia" yang sempurna untuk pengembangan ekonomi ramah lingkungannya. Keberlanjutan hutan dan ekosistem di daerah ini adalah aset dasar yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Sumber daya alam ini, termasuk hutan tropis yang masih ada dan kekayaan jenis hayati yang beraneka ragam, memberikan potensi luar biasa bagi Papua untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat tekanan yang signifikan, karena sumber daya yang sama ini juga terancam oleh praktik yang tidak berkelanjutan, seperti penambangan berlebihan, penggundulan hutan, dan perubahan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit. Karena itu, jalur menuju ekonomi ramah lingkungan tidak hanya merupakan suatu pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak guna melindungi sumber daya vital ini dari kerusakan akibat model ekonomi ekstraktif yang tradisional.

Di samping itu, penerapan ekonomi ramah lingkungan di Papua sangat menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Komunitas adat memiliki posisi penting dan pengetahuan lokal yang mendalam dalam mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Penggabungan pengetahuan lokal ini memastikan bahwa pembangunan bersifat ramah lingkungan sekaligus adil dari segi sosial dan budaya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai konsep ini dalam konteks Papua, berikut adalah ringkasan mengenai definisi dan prinsip utama dari ekonomi hijau dalam konteks Papua:

Tabel 1. Prinsip Kunci Ekonomi Hijau dalam Konteks Papua

Aspek Konseptual	Definisi / Prinsip Kunci	Relevansi dengan Konteks Papua
Definisi Umum	Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja melalui investasi yang mendukung pengurangan emisi dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta perlindungan keanekaragaman hayati.	Menjamin pertumbuhan ekonomi Papua selaras dengan daya dukung lingkungan yang tinggi, sekaligus mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam.
Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang.	Mendorong penerapan tiga pilar keberlanjutan di Papua, dengan mempertimbangkan ketergantungan masyarakat adat pada sumber daya alam.
Prinsip Rendah Karbon	Transisi menuju aktivitas ekonomi yang menekan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, konservasi hutan, dan penggunaan energi terbarukan.	Vital untuk menjaga hutan Papua sebagai penyerap karbon global dan mendukung target emisi nol bersih Indonesia.
Prinsip Efisiensi Sumber Daya	Penggunaan sumber daya alam dan energi secara bijaksana untuk meminimalkan limbah dan degradasi lingkungan.	Mengoptimalkan kekayaan sumber daya Papua tanpa eksploitasi berlebihan, guna mendukung ketahanan ekonomi dan lingkungan jangka panjang.
Prinsip Inklusif Sosial	Menjamin manfaat ekonomi dan lingkungan didistribusikan secara adil bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan pelaku ekonomi kecil.	Memastikan kesejahteraan masyarakat adat Papua dan memperluas partisipasi lokal dalam rantai nilai hijau.
Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Upaya melindungi, memulihkan, dan melestarikan ekosistem, spesies flora dan fauna sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi.	Papua memiliki keanekaragaman hayati terbesar di Indonesia dan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia yang perlu dijaga untuk keseimbangan ekologis.
Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat	Pengakuan dan integrasi pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola lingkungan.	Menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan berbasis budaya lokal, memperkuat identitas serta legitimasi sosial kebijakan hijau di Papua.

Dengan prinsip kunci ekonomi hijau di Papua, akan ada analisis mencakup kerangka strategi kebijakan yang telah ditetapkan, program unggulan yang sedang dilaksanakan, peran

dari berbagai pihak terkait, serta tantangan dan kesempatan yang terdapat dalam pelaksanaannya. Cakupan analisis ini mencakup provinsi-provinsi di kawasan Papua, dengan penekanan pada praktik pembangunan yang berhasil menyatukan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Tulisan ini berusaha untuk menyajikan wawasan yang mendalam dan memberikan saran yang bersifat proaktif untuk mempercepat peralihan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan di Papua.

METODE

Pendekatan yang paling relevan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami secara holistik fenomena yang kompleks, yaitu interaksi antara kearifan lokal, ekonomi, dan lingkungan, dalam konteks spesifik masyarakat adat di Papua.

- a. Studi Kasus : Peneliti dapat memilih beberapa komunitas adat di Papua yang masih mempraktikkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan fokus pada kasus-kasus ini, penelitian dapat mengungkap secara rinci bagaimana praktik-praktik tersebut berkorelasi dengan potensi ekonomi hijau.
- b. Analisis Dokumen : Mengkaji literatur, laporan penelitian, peraturan adat, dan dokumen historis terkait masyarakat adat di Papua dan pengelolaan hutan. Ini membantu membangun kerangka kontekstual yang komprehensif.

Tulisan ini menggunakan beberapa teori interdisipliner untuk menganalisis masalah yaitu :

- a. Teori Commons (Commons Theory): Dikembangkan oleh Elinor Ostrom, teori ini menjelaskan bagaimana komunitas dapat mengelola sumber daya bersama (common-pool resources) secara efektif dan berkelanjutan tanpa harus sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah atau pasar (Pablo Paniagua dkk, *Marine Policy*, Vol. 165, Juli 2024.). Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis sistem pengelolaan hutan komunal (hak ulayat) yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di Papua.
- b. Teori Modal Alam (Natural Capital Theory): Teori ini memandang alam, termasuk hutan dan keanekaragaman hayati, sebagai bentuk modal yang fundamental bagi kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi, (Amy R. Binner, Ethan T. Addicott dkk *Philosophical Transactions of the Royal Society B* (2025)). Dengan mengadopsi teori ini, penelitian dapat mengkategorikan hutan Papua bukan hanya sebagai sumber bahan baku, tetapi sebagai aset ekonomi vital yang harus dilindungi dan dikelola secara bijaksana. Dengan memadukan metode kualitatif yang mendalam dan kerangka teori yang relevan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua.

HASIL

A. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Pendukung Ekonomi Hijau di Papua

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon, yang dijelaskan dengan jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dedikasi ini merefleksikan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi perlu beriringan dengan keberlanjutan lingkungan. Secara khusus untuk Papua, percepatan kemajuan pembangunan diharuskan untuk didasarkan pada pendekatan yang afirmatif, menyeluruh, adil antara gender, dan sesuai konteks. Fokusnya adalah pada lima kerangka baru untuk Papua, di antaranya adalah peningkatan serta perlindungan kualitas lingkungan, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan yang rendah emisi karbon. Ini menunjukkan pengakuan di level tertinggi pemerintahan bahwa pola pembangunan sebelumnya sering kali

tidak bertahan lama, dan bahwa jalur yang lebih ramah lingkungan sangat vital untuk masa depan Papua.

Pendekatan baru pemerintah dalam mengelola program pembangunan hijau di Tanah Papua juga terlihat melalui Instruksi Presiden (Inpres) 9/2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) 20/2020, yang dilengkapi dengan pembentukan tim koordinasi yang terintegrasi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua secara aktif merencanakan Masterplan dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berlandaskan pada praktik berkelanjutan. Ini merupakan langkah krusial untuk merealisasikan komitmen tingkat nasional menjadi rencana tindakan yang nyata di tingkat lokal. Komitmen pemerintah untuk ekonomi ramah lingkungan di Papua terwujud melalui sejumlah langkah nyata. Ini mencakup pengembangan inisiatif pembangunan yang rendah emisi karbon, penghentian sementara konsesi perkebunan kelapa sawit, serta penangguhan konsesi hutan di Papua dan Papua Barat. Penangguhan ini, bersamaan dengan sasaran ambisius untuk menjadikan wilayah sebagai area terlindungi, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan yang signifikan dari model eksploitatif murni menuju pendekatan yang lebih berfokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Ini mencerminkan pemahaman menjaga keberlanjutan hutan dan ekosistem adalah syarat utama untuk pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyetujui Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan di wilayah Papua Barat. Peraturan ini ditujukan untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat adat Papua di tanah mereka serta seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara bijak demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka kebijakan ini juga mencakup penyediaan insentif fiskal yang berbasis ekologi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sambil tetap menjaga lingkungan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua mengisyaratkan langkah baru menuju perubahan yang lebih baik di Papua. Dalam undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua secara tegas diperintahkan untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Otonomi khusus ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya alamnya sendiri, termasuk dalam kerangka ekonomi yang ramah lingkungan. Hal ini membuka peluang bagi penyesuaian kebijakan ekonomi hijau sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekologi Papua yang istimewa, memungkinkan pelaksanaan yang lebih spesifik dan efisien. Kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dan jaminan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat adat menjadi aspek kunci dalam kerangka ini. Ini menunjukkan bahwa otonomi khusus bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk mengadaptasi kebijakan ekonomi hijau dalam konteks sosial dan ekologis Papua yang khas, yang dapat berpotensi mengatasi hambatan birokrasi di tingkat nasional.

Walaupun struktur kebijakan yang ada terlihat kuat dan mencakup banyak hal, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai rintangan. Laporan menyebutkan adanya "kurangnya kolaborasi antarinstansi" dan "pengawasan yang lemah terhadap eksploitasi sumber daya hutan". Ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan tidak secara otomatis memastikan pelaksanaan yang efektif. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana mengubah komitmen yang tinggi menjadi langkah-langkah terkoordinasi di lapangan, mengatasi silo dalam birokrasi, dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum, terutama mengingat luasnya dan tantangan geografi Papua. Berikut adalah ringkasan kebijakan dan regulasi utama yang mendukung pengembangan ekonomi hijau di Papua.

Tabel 2. Kebijakan dan Regulasi Utama Ekonomi Hijau di Papua

No.	Nama Kebijakan / Regulasi	Tahun	Lembaga Penerbit	Poin Kunci Relevan dengan Ekonomi Hijau	Sumber / Dokumen Referensi (temukan di situs resmi)
1	UU Nomor 2 Tahun 2021 (Perubahan Kedua UU No.21/2001 — Otonomi Khusus Papua)	2021	Pemerintah Pusat / DPR	Menandai babak baru pembangunan Papua; menegaskan arah otonomi khusus yang memasukkan aspek pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak adat; menekankan perencanaan yang kontekstual untuk kesejahteraan masyarakat.	Naskah UU No.2/2021 (peraturan.go.id / BPK RI / DPR RI)
2	Perpres Nomor 24 Tahun 2023 (RIPPP 2022–2041)	2023	Pemerintah Pusat	Rencana Induk Pembangunan Papua & Pulau-pulau terluar (contoh RIPPP) yang menempatkan pendekatan afirmatif, holistik dan mempertimbangkan kualitas lingkungan serta pembangunan inklusif.	Laman resmi Sekretariat Kabinet / Kementerian terkait (Perpres 24/2023)
3	PERDASUS Nomor 10 Tahun 2019 (Pembangunan Berkelanjutan — Prov. Papua Barat)	2019	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Mengamanatkan pembangunan berkelanjutan yang melindungi hak OAP, pemanfaatan SDA bijaksana, pelestarian dan pemulihan ekosistem; menetapkan target luas kawasan lindung (contoh: target 70% kawasan lindung di provinsi).	Perdatus Provinsi Papua Barat No.10/2019 (peraturan daerah provinsi / BKD Prov. Papua Barat)
4	Inpres No.9 Tahun 2020 & Keppres No.20 Tahun 2020	2020	Pemerintah Pusat	Instruksi dan pengaturan percepatan pembangunan Tanah Papua, pembentukan tim koordinasi terpadu, memasukkan strategi pembangunan hijau dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.	Laman Sekretariat Kabinet / Layanan Standar Instruksi Presiden / Keppres
5	Masterplan & Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Provinsi Papua)	Sedang disusun / inisiatif daerah	Pemerintah Provinsi Papua	Rencana strategis untuk mendorong ekonomi hijau berbasis lahan berkelanjutan: inklusi masyarakat adat, ketahanan sosial-ekonomi, konservasi ekosistem, investasi hijau.	Dokumen rancangan/publikasi Pemprov Papua atau dinas terkait (dokumen perencanaan daerah)

6	Moratorium Koneksi Kelapa Sawit & Hutan (kebijakan pembatasan izin/penangguhan izin di kawasan sensitif)	2020 (inisiatif / kebijakan sektor)	Kemenko Marves / KLHK / Pemerintah Pusat & Daerah	Komitmen pembatasan pemberian izin baru di kawasan hutan primer, gambut, dan kawasan sensitif di Papua untuk melindungi ekosistem — bagian dari upaya mengurangi deforestasi dan praktik eksploitatif.	Instrumen moratorium (Inpres terkait, kebijakan KLHK, publikasi Kemenko Marves, liputan media seperti Mongabay)
7	Insentif Fiskal Berbasis Ekologi (skema insentif daerah / nasional)	Diterapkan / inisiatif	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah	Insentif (fiskal/nonfiskal) yang diarahkan untuk praktik pemanfaatan SDA berkelanjutan, konservasi, dan ekonomi berbasis jasa ekosistem (mis. subsidi hijau, insentif pemulihan lahan).	Kebijakan fiskal / regulasi insentif di Kementerian Keuangan, kementerian terkait, atau peraturan daerah contoh (program provinsi/kabupaten)

B. Inisiatif dan Proyek Ekonomi Hijau Unggulan di Papua

Pengembangan ekonomi hijau di Papua tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan proyek konkret di berbagai sektor. Beberapa hal penting sebagai potensi unggul yang perlu dilihat :

1. Sektor Pertanian Berkelanjutan dan Kearifan Lokal

Pengembangan komoditas unggulan di Papua merupakan salah satu prioritas utama untuk investasi yang ramah lingkungan. Ide investasi yang mendukung lingkungan di Papua dan Papua Barat terbuka bagi produk pertanian serta perikanan dengan potensi ekspor yang besar, termasuk kakao, kopi Arabika, pala, rumput laut, dan kopi Robusta. Inisiatif Green Economic Growth (GEG) yang didanai oleh Inggris juga menyoroti komoditas pertanian ini, seperti sagu dan minyak kelapa murni. Program GEG berkomitmen untuk memberdayakan petani kecil serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Papua. Program ini menawarkan dukungan teknis yang sangat penting untuk membangun perekonomian lokal yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Melalui pelatihan, para agripreneur memperoleh keterampilan dalam manajemen bisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan baik produktivitas maupun kualitas hasil pertanian mereka. Pendekatan ini secara khusus menekankan keuntungan ekonomi bagi komunitas dan keluarga, dengan perhatian lebih terhadap keterlibatan perempuan serta pemuda.

Di samping itu, praktik pertanian organik dan ketahanan pangan yang berbasis komunitas juga mengalami perkembangan. Sebagai ilustrasi, masyarakat adat di Boven Digoel telah membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan halaman rumah untuk menanam sayuran organik seperti sawi dan kangkung. Mereka menerapkan metode sederhana dan menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah rumah tangga, yang tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan keluarga tetapi juga memiliki potensi sebagai usaha pertanian kecil yang berkelanjutan.

Inisiatif pertanian ramah lingkungan yang berbasis organik lainnya juga terjadi di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa hambatan yang muncul dari ketergantungan pada pupuk sintetis bisa diselesaikan dengan cara penyuluhan dan pendampingan. Meskipun awalnya terdapat keraguan dari para petani mengenai hasil dan waktu yang diperlukan, program ini berhasil memperluas wawasan petani dan memperlihatkan keuntungan yang tercermin dalam mutu produk, kelestarian tanah, serta kesehatan komunitas. praktik pertanian

yang berkelanjutan di Papua telah berlangsung selama beberapa generasi dan terhubung dengan kebijakan lokal. Contohnya, masyarakat Arfak melaksanakan pertanian subsisten dengan mengacu pada prinsip ekologis yang mereka sebut *igya ser hanjob*. Prinsip ini mengatur lokasi yang ideal untuk bercocok tanam dan menjamin keberlanjutan lingkungan serta ketahanan pangan bagi keluarga. Pengetahuan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan perempuan sebagai sosok utama yang menjaga kebijakan lokal tersebut.

Salah satu pendekatan kunci dalam pengembangan rantai nilai lokal oleh program GEG adalah memberi prioritas pada pasar lokal Papua untuk komoditas seperti sagu, kakao, kopi, minyak kelapa murni, rumput laut, dan pala, dibandingkan hanya berfokus pada ekspor. Pilihan ini didasari pemikiran bahwa aliran uang dalam perekonomian lokal dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan peluang usaha, serta mengurangi barang impor yang tidak diperlukan. Upaya GEG telah menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan di seluruh rantai nilai. Strategi ini merupakan perubahan signifikan dari model tradisional ekspor komoditas. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan nilai di tingkat lokal, bukan cuma mengambil bahan mentah untuk pasar global. Pendekatan ini juga membantu memecahkan tantangan yang disebabkan oleh geografi dan biaya logistik yang tinggi di Papua dengan fokus pada produk bernilai tinggi dan segmen pasar untuk konsumsi lokal, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi di dalam negeri.

Tabel 3. Ringkasan Inisiatif Ekonomi Hijau di Papua

Inisiatif/Proyek	Sektor	Aktor Kunci	Dampak Positif Utama
Green Economic Growth (GEG)	Agripreneurship, UMKM	Pemerintah, FCDO/NIRAS, Petani, UMKM	Peningkatan nilai tambah produk lokal, pemberdayaan ekonomi mikro, diversifikasi mata pencarian.
Ekowisata Raja Ampat	Pariwisata, Konservasi	KKP, Masyarakat Adat, Operator Tur	Peningkatan pendapatan komunitas, pelestarian budaya dan ekosistem laut, pendidikan lingkungan.
Ekowisata Arfak	Pariwisata, Konservasi	Masyarakat Adat,	Pemberdayaan
Inisiatif/Proyek	Sektor	Aktor Kunci	Dampak Positif Utama
		Charles Roring	komunitas sebagai pengelola dan pemandu, pengakuan kearifan lokal, perlindungan hutan.
Pertanian Organik Sorong	Pertanian	Pemerintah, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani	Peningkatan kualitas produk, keberlanjutan lahan, peningkatan pengetahuan teknis petani.

Model-model yang berhasil ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi hijau yang efektif di Papua bergantung pada penguatan aset yang sudah ada yakni pengetahuan lokal, komoditas khas, dan struktur sosial adat. Berbeda dengan model ekstraktif yang menganggap tanah adat sebagai "tanah kosong", model hijau mengakui bahwa pengelolaan lingkungan yang paling efektif telah dipraktikkan oleh masyarakat adat selama bergenerasi-generasi. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sosial dan budaya.

2. Membangun Pariwisata Ramah Lingkungan (Ekowisata)

Tanah Papua memiliki beragam lokasi wisata alam yang menakjubkan dan alami, seperti Pantai Base-G, Holtekamp, Hamadi, Ciberi, dan Yacoba di Jayapura. Potensi ini sangat besar untuk menciptakan bisnis wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan melestarikan hutan, lautan, dan kawasan pesisir, sektor pariwisata bisa secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor wisata sangat terlihat. Contoh keberhasilan dapat dilihat di Pantai Hamadi dan Holtekamp, di mana Kepala Kampung Enggros, Orgenes Meraudje, merasakan langsung keuntungan ekonomi dari pembangunan penginapan dan objek wisata. Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mengubah cara hidup mereka dari penjualan kelapa menjadi pengelolaan industri pariwisata.

Aturan yang mendukung ekowisata juga telah diperkenalkan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, contohnya, telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Pedoman Akomodasi Wisata yang Ramah Lingkungan, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan wisata berbasis ekowisata. Studi kasus mengenai penerapan konsep ekonomi hijau di Taman Nasional Wasur juga memperlihatkan bagaimana pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat terwujud. Prinsip-prinsip yang diterapkan mencakup keadilan antargenerasi (menjamin ketersediaan sumber daya untuk masa depan), pencegahan dampak buruk terhadap lingkungan (melalui reforestasi dan upaya menjaga kebersihan), serta perlindungan keanekaragaman hayati (dengan fasilitas konservasi untuk hewan dan tumbuhan endemik). Pengelolaan daya tarik wisata ini melibatkan partisipasi masyarakat lokal, yang memanfaatkan sumber daya alam dengan biaya minimal untuk meningkatkan mata pencaharian, menunjukkan bahwa nilai intrinsik lingkungan dapat menjadi fondasi ekonomi yang solid.

Namun, tantangan seperti manajemen sampah dari para pengunjung masih ada, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan fasilitas yang memadai. Keberhasilan proyek-proyek ini sangat tergantung pada kapasitas dan pemahaman masyarakat setempat. Program GEG, misalnya, menemukan bahwa pendekatan bisnis perlu disesuaikan dengan rendahnya tingkat literasi finansial, menggunakan alat yang lebih sederhana seperti kanvas bisnis. Di samping itu, hanya penyediaan manual tidaklah cukup; staf lapangan harus dikerahkan untuk memberikan pelatihan langsung tentang penggunaan dan pemeliharaan alat serta mesin. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi yang sesuai dengan konteks serta tingkat keterampilan lokal adalah hal yang sama pentingnya. Berikut adalah ikhtisar proyek dan inisiatif ekonomi hijau unggulan di Papua berdasarkan sektor.

Tabel 3. Proyek dan Inisiatif Ekonomi Hijau Unggulan di Papua Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Proyek/Inisiatif	Fokus Kegiatan	Manfaat/Dampak	Pelaksana/Mitra Utama
1	Energi Terbarukan (PLTS, Mikrohidro, Off-grid)	Program PLN superSUN & instalasi micro-hydro di pedesaan Papua	Penyediaan listrik desa terpencil melalui energi surya dan air	Akses listrik berkelanjutan, kurangi ketergantungan genset diesel, dorong produktivitas lokal	PLN, Pemprov Papua, LSM energi, Desa Adat
2	Kehutanan & REDD+ (Konservasi & Reforestasi)	Proyek REDD+ Papua & Papua Barat, program Reforestasi Komunitas Adat	Pelestarian hutan, pemantauan karbon, pemberdayaan masyarakat adat	Pendapatan karbon, konservasi hutan, peningkatan ekonomi desa	Kementerian LHK, BRGM, LSM lingkungan (WWF, YKAN), Komunitas Adat
3	Restorasi Mangrove & Blue Carbon	Program Rehabilitasi Mangrove Nasional & proyek Blue Carbon Indonesia	Penanaman dan perlindungan mangrove di pesisir selatan Papua	Penyerapan karbon, perlindungan pantai, peningkatan stok ikan	KLHK, BRGM, Pemerintah daerah, Komunitas nelayan
4	Perikanan Berkelanjutan & Pengelolaan Pesisir Komunitas	Inisiatif ATSEA Project (Arafura & Timor Seas)	Pengelolaan zona larangan tangkap, pelatihan nelayan berkelanjutan	Ketahanan pangan, pengurangan overfishing, nilai tambah hasil laut	KKP, ATSEA-2, Pemda pesisir, Nelayan lokal
5	Pariwisata Berkelanjutan / Ekowisata	Ekowisata Raja Ampat, program Stewards for Nature (Tambrau)	Wisata alam, konservasi terumbu karang, pelibatan masyarakat	Lapangan kerja lokal, konservasi ekosistem, promosi budaya lokal	Pemprov Papua Barat, RARCC, Komunitas lokal, LSM pariwisata lokal
6	Pertanian Berkelanjutan & Agroforestry	Proyek Agroforestry Syntropic Kebar-Tambrau, pengembangan Kakao & Madu Papua	Integrasi tanaman keras dan hortikultura, pelatihan petani	Diversifikasi pendapatan, perbaikan tanah, rantai pasok lokal	Dinas Pertanian, NGO agroforestry, Petani lokal
7	Pertambangan Hijau & Rehabilitasi Pascatambang	Rencana Rehabilitasi Tambang Papua, pilot Revegetasi	Reklamasi lahan, revegetasi, pengembangan	Kurangi dampak lingkungan, lapangan kerja baru pasca-tambang	KLHK, Dinas ESDM, Perusahaan tambang, Komunitas lokal

		area bekas tambang	ekonomi alternatif		
8	Manajemen Limbah & Waste-to-Energy	Skema nasional Danantara W2E, potensi model regional di Papua	Pengolahan limbah menjadi energi, pengurangan TPA terbuka	Listrik tambahan, kurangi polusi, kota lebih bersih	Kementerian ESDM, Pemda, Swasta, Komunitas kota
9	Desa Energi Berdikari (DEB) Malasigi	Energi Terbarukan	Pemanfaatan PLTS untuk pengembangan ekowisata berbasis hutan adat.	Penghematan dari BBM, peningkatan pendapatan LPHK, pengurangan emisi setiap tahun, perlindungan hutan adat.	PT Pertamina Hulu Energi, LPHK Belemepe, Pemprov Papua Barat
10	Taman Nasional Wasur, Papua	Ekowisata	Penerapan prinsip keadilan antargenerasi, pencegahan dini, perlindungan keanekaragam	Penerapan Konsep Green Economy di Taman Nasional Wasur	Pengelola TN Wasur, Masyarakat lokal, Pemerintah

C. Penguatan Fondasi Sosial: Partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat terwujud tanpa fondasi sosial yang kuat, terutama yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Meskipun kerangka hukumnya telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Masyarakat adat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan di Tanah Papua. Mereka berhak untuk mengajukan usulan kawasan konservasi dan memperoleh perlindungan serta pengembangan untuk kearifan lokal mereka. Pengakuan serta pemberdayaan terhadap masyarakat adat bukan hanya sekedar partisipasi, melainkan penempatan mereka sebagai pengambil keputusan yang krusial dan pelindung tanah serta sumber daya warisan mereka, dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat top-down kemungkinan besar tidak akan efektif tanpa pengakuan dan dukungan yang tulus dari para aktor lokal tersebut.

Masyarakat adat berada dalam posisi yang sangat rentan terkait dengan kehilangan lahan akibat tindakan perusahaan. Pengabaian terhadap hak-hak ini bukanlah suatu kebetulan; itu merupakan hasil yang logis dari ketidakmampuan negara dalam menegakkan peraturan hukumnya sendiri. Kekurangan ini mengurangi kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintahan dan menegaskan pandangan bahwa program pembangunan yang ada, meskipun memiliki berbagai label, akan selalu menguntungkan segelintir individu di lingkungan kekuasaan. Untuk itu, tanpa adanya dasar kepercayaan yang kokoh serta perlindungan hukum yang jelas terhadap tanah adat, setiap usaha yang menyandang label "ekonomi hijau" berisiko menjadi program dari atas ke bawah lainnya yang hanya mengulangi pola eksploitasi yang telah terjadi sebelumnya, karena itu Lembaga seperti Yayasan EcoNusa dan KOBUMI secara aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis masyarakat di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku melalui pemberdayaan komunitas setempat serta penguatan ekosistem bisnis yang berorientasi pada komunitas. JERAT Papua juga berkolaborasi dengan masyarakat adat di Supiori dan Boven Digoel untuk mengembangkan model ekonomi hijau dan biru yang berbasis pada kampung, dengan menggabungkan kearifan

lokal dalam proses konservasi dan pemanfaatan sumber daya. Partisipasi masyarakat adat dan kearifan lokal merupakan kekuatan unik. Peran sentral masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi fondasi yang kuat untuk implementasi ekonomi hijau yang kontekstual dan berkelanjutan.

Beberapa studi kasus dan praktik terbaik di Papua memberikan gambaran konkret tentang implementasi ekonomi hijau di lapangan, menyoroti keberhasilan dan tantangan yang dihadapi:

a. Taman Nasional Wasur

Penerapan ide ekonomi berkelanjutan di lokasi wisata Taman Nasional Wasur di Papua menggambarkan bagaimana pembangunan yang menghargai lingkungan dapat diwujudkan. Pengelolaan Taman Nasional Wasur memadukan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini mencakup prinsip keadilan untuk generasi yang akan datang, yang menjamin bahwa sumber daya alam dan potensi ekonomi akan tetap dapat dinikmati serta dikelola oleh generasi yang akan datang. Selain itu, prinsip pencegahan kerusakan lingkungan diterapkan dengan pemasangan tanda peringatan untuk menjaga kebersihan, serta upaya reforestasi melalui penanaman pohon, demi menjaga keberlangsungan hidup vegetasi dan juga kenyamanan para pengunjung.

Pelestarian keanekaragaman hayati pun menjadi perhatian utama, dengan adanya fasilitas konservasi bagi fauna dan flora endemik Papua di area perkemahan, yang memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang tanpa gangguan. Pengelolaan area wisata ini melibatkan masyarakat setempat, yang memanfaatkan potensi alam dengan biaya yang rendah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menunjukkan bahwa nilai intrinsik dari lingkungan dapat berfungsi sebagai fondasi ekonomi yang kuat. Namun, tantangan seperti pengelolaan limbah dari pengunjung masih tetap ada, menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan fasilitas yang memadai.

b. Model Pembangunan Berbasis Kampung (Supiori, Boven Digoel)

JERAT Papua memfasilitasi pengembangan model ekonomi berkelanjutan yang berbasis komunitas di Kabupaten Supiori dan Boven Digoel, dengan menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal. Di Supiori, masyarakat adat memulai upaya konservasi serta mengolah buah mangrove yang dikenal sebagai 'aibon' menjadi tepung dan nasi. Langkah ini bertujuan untuk melestarikan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, dengan melibatkan pemilik hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Di Boven Digoel, kelompok perempuan berinisiatif untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan halaman rumah mereka untuk menanam sayuran organik, seperti sawi dan kangkung. Tindakan ini mendukung kemandirian pangan serta menciptakan usaha kecil yang berkelanjutan. Sekolah Kampung Mindiptana diakui sebagai contoh pendidikan alternatif yang mengedepankan kearifan lokal serta menanamkan kesadaran lingkungan dan prinsip ekonomi hijau kepada generasi muda sedari awal. Keberhasilan inisiatif berskala kecil dan berbasis komunitas ini, seperti pengolahan mangrove 'aibon' dan usaha pertanian pekarangan oleh wanita, membuktikan bahwa model ekonomi hijau ini dapat memberikan hasil yang berarti. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyalin dan memperluas model-model ini ke daerah lain di Papua. Hal ini akan membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, akses pasar yang lebih baik, dan pelatihan berkelanjutan, seperti yang dianjurkan dari pengalaman program GEG, agar inisiatif ini dapat berkembang dari skala lokal menjadi kontributor utama bagi ekonomi hijau di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, berbagai studi kasus dan praktik terbaik ini menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi pijakan unik untuk keberlanjutan di Papua. Keberhasilan penerapan ekonomi hijau sangat terkait dengan pengintegrasian kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat adat. Ini bukan hanya tentang "pemberdayaan," tetapi juga pengakuan terhadap sistem pengetahuan dan praktik pengelolaan sumber daya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ini menandakan bahwa solusi yang efektif di Papua biasanya bersifat endogen, bukan

semata dari luar, dan bahwa pendekatan "bottom-up" yang memperhatikan konteks budaya adalah kuncinya.

KESIMPULAN

Tanah Papua menyimpan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, didorong oleh sumber daya alam yang melimpah serta pengetahuan lokal dari masyarakat adat yang kaya. Sebuah kebijakan yang komprehensif telah dibangun baik di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan dedikasi pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada rendah karbon dan berkelanjutan. Beragam program inovatif di bidang pertanian, perikanan, energi terbarukan, dan ekowisata telah memberikan hasil positif yang signifikan, dengan penekanan pada penguatan komunitas lokal serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat adat, terbukti menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan ini.

Namun, pengembangan ekonomi hijau di Papua masih menghadapi berbagai tantangan besar. Hal ini meliputi kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga, terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan investasi yang cukup, kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta tingkat pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif terhadap praktik eksploitasi sumber daya. Rintangan geografis dan logistik juga menambah tingkat kesulitan, sementara masalah pengelolaan limbah di lokasi wisata dan ancaman deforestasi terus menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius.

REFERENSI

- Agence Française de Développement. (n.d.). Ressources Accueil (Indonesia).
- Asrudi, & Puspa, L. (2021). Penerapan konsep green economy di objek Taman Nasional Wasur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 115–126.
- Asian Development Bank. (2022). Green infrastructure investment opportunities: Indonesia—Green recovery 2022 report.
- Badan Pusat Statistik (BPS), & Pusat Riset Kependudukan—Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK—BRIN). (2022, November 10).
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat. (2022). Pengembangan pertanian organik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sorong. <https://papuabarat.litbang.pertanian.go.id>
- Bank Papua. (2024). Mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui transformasi digital.
- Bringing green electricity to Papua, empowering economic growth. (n.d.). Antara News. <https://en.antaranews.com/news/350525/bringing-green-electricity-to-papua-empowering-economic-growth>
- AJ Putra, J Talakua. 2025. [DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA PADA TAHUN 2017–2024](#)
- Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM. (2025, Juli 28). KKN UGM dan KAGAMA Papua Barat tanam 300 pohon di Manokwari: Wujud nyata kolaborasi untuk lingkungan.
- DJKN Kementerian Keuangan. (2024, Oktober 9). Webinar pembangunan ekonomi hijau Papua Barat.
- DPR RI. (2022, Desember). Peluang green economy atasi tantangan ekonomi global 2023.
- EcoNusa. (2021, April 12). Pengelolaan wisata berkelanjutan Pantai Hamadi dan Holtekam.
- EcoNusa. (2025, Agustus 6). Konsolidasi EcoNusa—KOBUMI memperkuat ekonomi hijau berbasis masyarakat.
- JFD Talakua, GN Marpaung, JI Nussy (2025), [Development of Sago Ecotourism in Negeri Rutong to Maintain Food Security](#)

- JERAT Papua. (2025, Maret 13). Masyarakat adat di Supiori dan Boven Digoel kembangkan ekonomi hijau dan biru sebagai model pembangunan berbasis kampung.
- Katadata. (2022). Booklet pembangunan hijau Tanah Papua.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). Laporan pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat. <https://kkp.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2020, Februari 27). Menko Luhut luncurkan konsep investasi hijau untuk Papua.
- Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). (2025, Agustus 19). Status Kehati Indonesia diluncurkan: KLH/BPLH–Bappenas dorong tata kelola berkelanjutan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). Strategi implementasi ekonomi rendah karbon di Indonesia. Jakarta: KLHK. <https://www.menlhk.go.id>
- KOBUMI. (2023). Laporan Tahunan KOBUMI 2023. https://kobumi.id/pdf/Laporan_Tahunan_KOBUMI_2023_ID.pdf
- Maritim.go.id. (2020, Juni 27). Siaran pers No.SP-22/HUM/ROKOM/SET-MARVES/VI/2020.
- Mongabay Indonesia. (2020). Ekowisata Arfak: Perpaduan kearifan lokal dan konservasi hutan Papua. <https://www.mongabay.co.id>
- Moratorium konsesi kelapa sawit dan hutan di Tanah Papua. (2020, Juli 7). Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2020/07/07/lindungi-hutan-papua-kebijakan-pusat-dan-daerah-harus-sejalan>
- Niras. (2023, Februari 28). Supporting green businesses and small-holder farmers while protecting vulnerable forests in Indonesia.
- Niras & UK FCDO. (2018). Green Economic Growth Programme in Papua Province (GEG). <https://www.niras.com/projects/green-economic-growth-papua>
- Papua Barat Provinsi. (2019). Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/194628/perdasus-papua-no-10-tahun-2019>
- Papua.go.id. (2018, September 14). Pemerintah Provinsi Papua fokus dorong pertumbuhan ekonomi hijau.
- Pertamina Hulu Energi. (2025, Februari 20). Desa energi berdikari Pertamina hadirkan kemandirian energi di kampung adat Malasigi Papua. <https://phe.pertamina.com/id/media/desa-energi-berdikari-pertamina-hadirkan-kemandirian-energi-di-kampung-adat-malasigi-papua>
- Planting mangrove forests is paying off in Indonesia. (2023, November 30). World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/11/30/planting-mangrove-forests-is-paying-off-in-indonesia>
- Syntropic Agroforestry Project. (n.d.). Stichting RARCC. <https://stichting-rarcc.org/projects/syntropic-agroforestry-project>
- UNDP. (n.d.). PIP – Papua Platform for the Acceleration of Sustainable Development (Indonesia).
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). Our common future (Brundtland Report). Oxford: Oxford University Press.
- Warta Alor. (2024, Mei 18). Apresiasi pembangunan berkelanjutan di Papua dengan konsep ekonomi hijau.
- World Bank. (2025, Juni 16). World Bank approves investments to boost Indonesia’s economic growth and access to clean energy.
- World Bank. (n.d.). Indonesia economic prospects.

WRI Indonesia. (n.d.). Meninjau keadaan ekonomi hijau Indonesia: Bagaimana seharusnya strategi kita melangkah ke depan. <https://wri-indonesia.org/id/inisiatif/protecting-landscape-tanah-papua>